

# **KINERJA POLRES KENDAL DALAM MENANGANI KASUS TAWURAN PELAJAR DI KABUPATEN KENDAL**

**Felisha Erika Putri Nurmala, Augustin Rina Herawati**

**Program Studi S1 Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro  
Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405  
Laman: [www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id)  
Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)**

---

## ***ABSTRACT***

Student brawls in Kendal Regency have escalated from sporadic juvenile incidents into organised acts of collective violence involving bladed weapons and social-media-driven mobilisation, posing a tangible threat to public order and security. This study analyses the performance of the Kendal District Police (Polres Kendal) in handling student brawls and identifies the supporting and inhibiting factors affecting that performance. A descriptive qualitative method was applied with purposive and snowball sampling, involving structural officers of Polres Kendal as well as students previously implicated in brawls. Data were collected through in-depth interviews, non-participatory observation, and documentation, then analysed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña within Agus Dwiyanto's public-organisation performance framework. The study finds that police performance has been actively implemented across multiple dimensions, particularly in operational response and incident handling, through the simultaneous application of preventive, repressive, and educative measures. However, its effectiveness remains constrained, most notably in personnel capacity, territorial surveillance coverage, and the consistency of post-guidance monitoring. Conversely, the utilisation of cyber patrol technology, leadership support, and school collaboration constitute reinforcing factors, though their implementation requires further strengthening to generate more sustained impact in curbing recurring patterns of student brawls.

***Keywords: Police Performance, Student Brawls, Productivity, Preventive Policing, Responsiveness***

## ABSTRAK

Tawuran pelajar di Kabupaten Kendal telah berkembang dari insiden kenakalan remaja yang bersifat sporadis menjadi aksi kekerasan kolektif yang terorganisasi, melibatkan senjata tajam dan mobilisasi berbasis media sosial sehingga mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat secara nyata. Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja Kepolisian Resor Kendal dalam menangani tawuran pelajar serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan informan secara purposive dan snowball sampling, melibatkan pejabat struktural Polres Kendal serta pelajar yang pernah terlibat tawuran. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña dalam kerangka kinerja organisasi publik Agus Dwiyanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja kepolisian telah berjalan aktif pada berbagai dimensi, khususnya dalam aspek operasional dan respons terhadap kejadian. Pendekatan yang diterapkan mencakup langkah preventif, represif, serta edukatif yang dijalankan secara simultan. Namun, efektivitasnya masih menghadapi keterbatasan, terutama pada kapasitas personel, cakupan wilayah pengawasan, serta konsistensi pemantauan pascapembinaan. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi patroli siber, dukungan kepemimpinan, dan kolaborasi dengan sekolah menjadi faktor yang memperkuat kinerja, meskipun implementasinya masih memerlukan penguatan agar mampu menghasilkan dampak yang lebih berkelanjutan dalam menekan pola tawuran pelajar.

**Kata Kunci: Kinerja Kepolisian, Tawuran Pelajar, Produktivitas, Preventif, Responsivitas**

## PENDAHULUAN

Tawuran pelajar merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang terus menjadi perhatian serius di berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (2022), lebih dari 202 kasus tawuran pelajar tercatat dalam satu tahun di tingkat nasional. Di Provinsi Jawa Tengah, tren serupa terjadi, terutama setelah pembelajaran tatap muka kembali diberlakukan pascapandemi COVID-19.

Kabupaten Kendal menjadi salah satu wilayah yang mengalami eskalasi tawuran pelajar cukup signifikan. Dalam rentang 2018–2025, setidaknya sembilan kasus besar tercatat dalam liputan media, dengan puncak eskalasi pada 2023 yang menyebabkan satu korban jiwa dan melibatkan puluhan pelajar bersenjata tajam. Data resmi Polres Kendal bahkan jauh melampaui angka itu: 12 laporan polisi pada 2024 dan 10 laporan pada 2025, angka yang menegaskan bahwa skala persoalan ini secara signifikan lebih besar dari yang tampak di permukaan pemberitaan publik.

Fenomena di Kendal memiliki karakter berbeda dibandingkan daerah lain, ditandai oleh pola tawuran yang terorganisasi serta pergeseran ke ranah digital. Kelompok remaja yang menyebut diri "kreak" atau gangster pelajar

menggunakan fitur *live streaming* Instagram dan TikTok untuk menyampaikan tantangan terbuka kepada kelompok lain, menjadikan viralitas sebagai motor mobilisasi. Jarak antara provokasi digital dan realisasi fisik tawuran hanya berkisar satu hingga dua jam, sehingga membentuk dinamika tersendiri yang menuntut responsivitas kepolisian di luar pola konvensional.

Kondisi tersebut menempatkan Polres Kendal pada posisi dilematis. Di satu sisi, ia bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana diamanatkan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di sisi lain, sebagian besar pelaku tawuran adalah anak di bawah umur yang dilindungi oleh UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang mewajibkan pendekatan rehabilitatif dan membatasi kewenangan penindakan. Ketegangan normatif antara dua mandat hukum inilah yang menjadi inti kompleksitas kinerja Polres Kendal.

Penelitian terdahulu mengenai penanganan tawuran pelajar secara konsisten menemukan hambatan serupa seperti keterbatasan personel, koordinasi lintas sektor yang lemah, dan pendekatan yang cenderung reaktif. Namun penelitian-penelitian tersebut dilakukan di konteks perkotaan besar dengan karakteristik sosial

yang berbeda, dan belum menyentuh fenomena yang lebih terorganisasi dengan dimensi digital yang dominan sebagaimana terjadi di Kendal.

Berdasarkan latar belakang tersebut Penelitian ini menganalisis kinerja Polres Kendal melalui kerangka kinerja organisasi publik Agus Dwiyanto (2006) yang mencakup lima dimensi: produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, tanggungjawab, dan akuntabilitas. Secara simultan, faktor-faktor yang memengaruhi kinerja dianalisis menggunakan kerangka Ruky dalam Hessel (2005) yang meliputi teknologi, kualitas SDM, lingkungan fisik, budaya organisasi, kepemimpinan, dan pengelolaan sumber daya manusia.

## **KAJIAN TEORI**

### **a. Kinerja Organisasi Publik**

Agus Dwiyanto (2006) menegaskan bahwa kinerja organisasi publik tidak dapat dinilai semata dari output kuantitatif, melainkan harus mencakup lima dimensi yang saling terkait. *Produktivitas* mengukur rasio antara input dan output sekaligus efektivitas pelayanan dalam menghasilkan hasil yang diharapkan. *Kualitas layanan* berkaitan dengan persepsi dan kepuasan masyarakat terhadap cara aparat memberikan pelayanan. *Responsivitas* adalah kemampuan organisasi mengenali kebutuhan masyarakat dan menyesuaikan

program secara proaktif. *Responsibilitas* menjelaskan kepatuhan pelaksanaan tugas terhadap prinsip-prinsip administrasi dan norma hukum yang berlaku. *Akuntabilitas* mengukur sejauh mana kebijakan dan aktivitas organisasi publik dapat dipertanggungjawabkan kepada pemberi mandat, baik secara vertikal kepada otoritas yang lebih tinggi maupun secara horizontal kepada publik.

### **b. Faktor yang Memengaruhi Kinerja**

Ruky dalam Hessel (2005) mengidentifikasi enam faktor yang berkaitan langsung dengan tingkat pencapaian kinerja: (1) teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja; (2) kualitas input atau material yang digunakan; (3) kualitas lingkungan fisik termasuk aksesibilitas wilayah; (4) budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan kerja yang melekat; (5) kepemimpinan sebagai upaya mengendalikan anggota agar bekerja sesuai standar dan tujuan; serta (6) pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup kompensasi, promosi, dan pembinaan.

### **c. Teori Kontrol Sosial dan *Routine Activity***

Dua perspektif teoretis menjadi landasan memahami akar fenomena tawuran. Travis Hirschi (1969) melalui

*Social Control Theory* menjelaskan bahwa perilaku menyimpang muncul ketika ikatan sosial individu terhadap keluarga, sekolah, dan masyarakat melemah. Cohen dan Felson (1979) melalui *Routine Activity Theory* menegaskan bahwa kejahatan terjadi ketika tiga elemen bertemu: pelaku termotivasi, sasaran rentan, dan ketiadaan pengawas efektif. Dalam konteks tawuran di Kendal, kedua teori ini secara bersama menjelaskan mengapa tawuran tidak hanya terjadi, tetapi berulang dengan pola waktu dan lokasi yang relatif konsisten.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan penelitian yang tidak sekadar mendeskripsikan fakta, melainkan memahami makna di balik fenomena penanganan tawuran pelajar secara mendalam dan kontekstual (Sugiyono, 2017; Moleong, 2017). Situs penelitian adalah Polres Kendal beserta jajaran satuan fungsionalnya di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah.

Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling untuk menetapkan informan utama yang memiliki kewenangan dan keterlibatan langsung dalam penanganan tawuran, yang kemudian diperluas melalui snowball sampling untuk

menjangkau perspektif dari pihak eksternal. Sembilan informan kunci dilibatkan dalam penelitian, yakni Kepala Satuan Reserse Kriminal, Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan, Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat, Kepala Satuan Samapta, Kepala Satuan Lalu Lintas, Kepala Bagian Operasi, satu pelaku tawuran, satu perwakilan pihak sekolah, dan satu warga masyarakat.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara semi-terstruktur, observasi non-partisipatif, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode, member check kepada informan utama, serta penyusunan audit trail sebagai dasar konfirmabilitas penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dinamika Tawuran Pelajar di Kabupaten Kendal**

Sebelum menilai kinerja kepolisian, perlu dipahami terlebih dahulu skala dan karakteristik ancaman yang dihadapi. Tabel 1 menyajikan perbandingan antara jumlah kasus yang terekspos media dengan laporan resmi yang diterima Polres Kendal.

**Tabel 1. Perbandingan Jumlah Kasus Tawuran Pelajar di Kabupaten Kendal**

Tahun	Kasus Media	LP Resmi (Polres)	Karakteristik Utama
2023	3	≥1 fatal	1 korban meninggal; dominasi senjata tajam; puncak eskalasi
2024	2	12	Tersebar di 6 kecamatan: Gemuh, Pegandon, Patean, Patebon, Kaliwungu, Singorojo; jam dominan 01.00–03.30 WIB
2025	2	5	Modus penguasaan senjata tajam & pengeroyokan; 1 korban meninggal; warga sipil biasa sebagai pelapor utama

*Sumber: Data Polres Kendal dan Rekapitulasi Liputan Media (diolah penulis, 2026)*

Kesenjangan antara data media dan laporan resmi menunjukkan bahwa sebagian besar kejadian tawuran tidak terpublikasi ke ruang publik. Kondisi ini menegaskan bahwa gangguan keamanan tersebut telah dirasakan langsung oleh masyarakat, tercermin dari adanya laporan warga kepada kepolisian, termasuk pada peristiwa yang tidak diliput media. Perbedaan angka tersebut tidak sekadar menunjukkan selisih statistik, tetapi mengindikasikan keterbatasan eksposur

publik terhadap realitas kejadian di lapangan. Penurunan frekuensi kasus pada tahun 2025 juga tidak serta-merta mencerminkan penurunan tingkat ancaman. Sejumlah laporan menunjukkan keterlibatan warga sipil sebagai pelapor yang secara tidak sengaja berpapasan dengan kelompok bersenjata di jalan umum. Temuan ini menunjukkan adanya pergeseran karakter ancaman, dari konflik antarpelajar menjadi gangguan keamanan publik yang berpotensi menyasar masyarakat secara luas.

### 1. Produktivitas

Produktivitas Polres Kendal dalam menangani tawuran pelajar menunjukkan intensitas kerja yang cukup tinggi secara operasional. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan, mulai dari patroli rutin dan insidentil pada jam-jam rawan, penindakan terhadap pelaku beserta penyitaan senjata tajam, pembinaan pelajar yang terlibat, koordinasi dengan pihak sekolah dan keluarga, hingga evaluasi mingguan berbasis pemetaan pola kejadian. Program Polisi Menyapa yang menempatkan personel kepolisian sebagai inspektur upacara di sekolah-sekolah berisiko tinggi juga menjadi salah satu inovasi preventif yang dilaksanakan secara terprogram.

Secara output, rangkaian kegiatan ini menunjukkan intensitas kerja yang cukup

tinggi dan terdokumentasi. Namun apabila diukur dari sisi outcome, yaitu sejauh mana kegiatan tersebut menghasilkan perubahan nyata dan berkelanjutan dalam pola tawuran, hasil yang dicapai masih belum optimal. Kasus masih berulang dengan karakteristik yang serupa dari tahun ke tahun. Temuan ini konsisten dengan argumentasi Dwiyanto (2006) bahwa produktivitas organisasi publik bukan semata-mata soal volume kegiatan, melainkan soal dampak yang dihasilkan bagi masyarakat.

Salah satu hambatan struktural yang membatasi produktivitas adalah keterbatasan jumlah personel patroli relatif terhadap cakupan wilayah dan intensitas kejadian. Kabupaten Kendal memiliki luas sekitar 1.002 km<sup>2</sup> dengan titik rawan tawuran yang tersebar di enam kecamatan, mulai dari kawasan pesisir Kaliwungu hingga wilayah pedalaman Patean. Dengan jumlah personel yang terbatas, patroli hanya dapat menjangkau titik-titik tertentu secara bergantian, sehingga selalu ada celah waktu dan lokasi yang tidak terpantau. Kondisi ini diperparah oleh adanya sekitar 400 akun media sosial yang diidentifikasi Satuan Intelijen dan Keamanan sebagai akun yang terafiliasi kelompok gangster pelajar pada sebuah ekosistem digital yang pergerakannya jauh lebih cepat dari kapasitas respons lapangan yang tersedia.

Dimensi lain yang turut menghambat adalah sifat alamiah pembinaan terhadap pelajar yang terlibat tawuran. Pendekatan pembinaan yang dilakukan Polres Kendal berlangsung dalam durasi terbatas, sementara pelajar yang dikembalikan ke komunitas asalnya kembali menghadapi tekanan kelompok sebaya yang jauh lebih lama dan lebih intens. Keseimbangan durasi antara intervensi institusional dan eksposur lingkungan sosial inilah yang menjadi batas nyata produktivitas pembinaan Polres Kendal dalam jangka panjang.

## **2. Kualitas Layanan**

Kualitas layanan Polres Kendal menunjukkan kekuatan yang paling konsisten di antara kelima dimensi: kualitas layanan menunjukkan konsistensi yang paling menonjol. Pendekatan humanis dalam penanganan pelajar yang terlibat tawuran dikonfirmasi secara konsisten dari berbagai sumber informan — baik aparat, pelajar yang pernah menjalani proses pengamanan, maupun pihak sekolah. Pelajar yang diamankan tidak langsung diproses secara hukum, melainkan difasilitasi kebutuhan dasarnya, diarahkan untuk beribadah, dan dipertemukan dengan orang tua serta pihak sekolah sebagai bagian dari penyelesaian. Pendekatan ini meninggalkan persepsi bahwa kepolisian

hadir sebagai pembina, bukan semata-mata sebagai penghukum.

Dampak koordinasi informasi antara Polres dan sekolah juga terlihat konkret. Setelah menerima informasi dari kepolisian mengenai keterlibatan siswanya, SMK Bina Utama menjatuhkan sanksi pengeluaran terhadap siswa yang terbukti terlibat tawuran. Tindakan tegas sekolah tersebut merupakan efek *deterrence* yang melampaui kapasitas kepolisian sendiri, sekaligus membuktikan bahwa kualitas layanan tidak hanya diukur dari interaksi langsung antara aparat dan masyarakat, tetapi juga dari kemampuan membangun kepercayaan lintas institusi.

Meskipun demikian, kualitas layanan belum mencapai taraf yang berkelanjutan secara sistemik. Kepuasan masyarakat masih bersifat situasional: meningkat ketika patroli aktif dan aparat terlihat di lapangan, lalu menurun kembali ketika intensitas pengawasan berkurang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa rasa aman yang terbangun masih terikat pada kehadiran fisik aparat, bukan pada kondisi keamanan yang telah terinternalisasi secara permanen di lingkungan masyarakat.

### **3. Responsivitas**

Responsivitas Polres Kendal menunjukkan pola yang adaptif dan terus berkembang, meskipun belum sepenuhnya

bersifat prediktif. Dua inovasi yang paling signifikan adalah pembentukan Unit Kecil Lengkap (UKL) dan Tim Patroli Siber. UKL merupakan satuan mobile lintas fungsi yang menggabungkan personel dari Polsek, Reskrim, Lantas, dan Intelkam, beroperasi dalam empat rayon wilayah pada pukul 01.30 hingga 04.00 WIB. Efektivitas UKL terbukti secara konkret ketika Tim UKL Rayon 2 berhasil menggagalkan aksi tawuran pada 19 Oktober 2025 dini hari di kawasan Kebondalem, dengan mengamankan tiga pelajar beserta senjata tajam dan perangkat komunikasi yang digunakan untuk koordinasi.

Tim Patroli Siber Satuan Intelijen dan Keamanan melengkapi respons lapangan dengan pemantauan di ruang digital. Tim ini memantau ratusan akun yang terafiliasi kelompok gangster, termasuk membaca kode komunikasi yang digunakan untuk menyamarkan rencana tawuran. Kemampuan membaca kode-kode tersebut memungkinkan aparat mendeteksi potensi bentrokan sebelum terjadi secara fisik.

Namun responsivitas menghadapi batas yang belum teratasi secara struktural, yaitu keterbatasan ketahanan operasional personel pada jam-jam dini hari. Sebagian besar personel lapangan Polres Kendal berusia di atas 40 tahun, sehingga patroli berkepanjangan hingga menjelang subuh

menimbulkan kelelahan fisik yang nyata. Para pelaku tawuran tampaknya memahami pola ini: pergeseran waktu aksi menuju pukul 05.00–05.30 WIB saat jeda antara patroli subuh berakhir dan aktivitas pagi belum dimulai bukan sekadar kebetulan. Peristiwa kematian seorang korban tawuran di kawasan Jambearum pada pukul 05.30 WIB menjadi bukti tragis bahwa celah jam transisi tersebut memiliki konsekuensi yang fatal.

Selain faktor usia, kesenjangan generasi juga menciptakan hambatan kognitif tersendiri. Personel senior yang lebih akrab dengan konflik fisik konvensional tidak selalu memiliki pemahaman intuitif terhadap logika eksistensi digital yang menggerakkan kelompok gangster pelajar. Bagi remaja pelaku tawuran, kemenangan bukan satu-satunya tujuan, jumlah penonton dalam sesi live streaming dan tingkat viralitas konten menjadi ukuran status sosial yang tidak kalah pentingnya. Pemahaman terhadap logika ini menjadi prasyarat untuk merancang strategi pencegahan yang tepat sasaran.

#### **4. Responsibilitas**

Responsibilitas Polres Kendal dalam penanganan tawuran pelajar tergolong kuat dari sisi kepatuhan prosedural. Setiap perkara yang melibatkan

anak diarahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sebagai pelaksana utama penanganan, disertai pelibatan Balai Pemasarakatan (Bapas) dan Pekerja Sosial dari Dinas Sosial untuk melakukan penelitian kemasyarakatan sebelum keputusan proses hukum dijatuhkan. Mekanisme ini memastikan bahwa tidak ada keputusan yang diambil secara sepihak oleh aparat, melainkan melalui pertimbangan multi-institusi.

Prinsip *ultimum remedium* bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir diterapkan secara konsisten melalui diferensiasi penanganan yang jelas. Pelajar yang sekadar berkumpul tanpa unsur pidana cukup mendapat teguran dan dikembalikan kepada orang tua; pelajar yang membawa senjata tajam diproses hukum; sementara pelaku yang menyebabkan korban jiwa menjalani proses peradilan penuh. Diferensiasi ini mencegah kriminalisasi berlebihan terhadap pelajar yang berperan pasif, sekaligus memastikan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku yang menyebabkan kerugian serius.

Program *Therapy Healing* yang dilaksanakan Satuan Binmas pascakonflik merupakan langkah substantif yang melengkapi pendekatan legalistik. Konseling tidak hanya diberikan kepada pelajar yang terlibat, tetapi juga kepada orang tua dan pihak sekolah secara

bersama, dengan tujuan memulihkan kondisi psikologis sekaligus mengidentifikasi akar motivasi keterlibatan dalam tawuran, apakah berasal dari tekanan teman sebaya, dinamika keluarga, atau kebutuhan pengakuan sosial.

Keterbatasan responsibilitas justru terletak pada apa yang terjadi setelah proses formal berakhir. Tidak ada protokol yang secara eksplisit menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas pemantauan pelajar pascapembinaan. Tanggung jawab tersebut dalam praktiknya diserahkan kepada keluarga dan sekolah, namun tanpa komitmen formal yang mengikat. Keterlibatan orang tua dalam mendukung proses pembinaan lanjutan pun masih sangat bervariasi antarkeluarga. Kekosongan protokol lintas institusi ini di mana kepolisian, sekolah, Bapas, dan Dinas Sosial masing-masing memiliki batas kewenangan yang tidak saling menyambung menjadi titik paling kritis dalam keseluruhan sistem responsibilitas Polres Kendal.

## **5. Akuntabilitas**

Akuntabilitas vertikal Polres Kendal berfungsi sebagai mekanisme pembelajaran organisasi yang nyata dan terukur. Laporan Atensi Intelijen yang disusun secara rutin oleh Satuan Intelijen dan Keamanan tidak sekadar menjadi arsip

administratif, melainkan digunakan sebagai dasar penyesuaian kebijakan operasional yang konkret. Pola patroli ditingkatkan dari satu kali menjadi tiga kali sehari pada pukul 20.00, 23.00, dan 02.00 WIB sebagai respons langsung atas temuan pergeseran jam tawuran yang terdokumentasi dalam laporan intelijen. Siklus monitoring, evaluasi, dan tindakan korektif ini mencerminkan model akuntabilitas berbasis kinerja yang sehat.

Akuntabilitas horizontal kepada publik, sebaliknya, menghadapi defisit yang lebih sulit diatasi. Polres Kendal tidak dapat mempublikasikan identitas anak yang berhadapan dengan hukum sesuai ketentuan UU SPPA kebijakan yang secara normatif sudah benar. Persoalannya, pembatasan ini jarang dikomunikasikan secara proaktif kepada masyarakat. Akibatnya, masyarakat yang tidak memahami landasan regulasinya cenderung menafsirkan ketertutupan informasi sebagai ketidakseriusan penanganan, padahal proses hukum tetap berjalan di balik layar. Absennya strategi komunikasi publik yang memadai ini menjadi sumber defisit kepercayaan yang sebenarnya tidak perlu terjadi.

## **FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT KINERJA**

### **a. Faktor Pendukung**

1. Teknologi patroli siber menjadi faktor pendukung yang paling distinktif. Tim Patroli Siber Satuan Intelijen memungkinkan deteksi potensi tawuran sebelum terjadi secara fisik, dengan memantau akun media sosial, membaca kode komunikasi, dan memetakan pola mobilisasi secara real-time. Kemampuan ini secara signifikan memperpanjang jangkauan pengawasan kepolisian ke ruang digital yang selama ini menjadi arena utama koordinasi kelompok gangster pelajar, dan terbukti berkontribusi pada keberhasilan UKL menggagalkan aksi tawuran sebelum massa sempat berkumpul.
2. Budaya organisasi yang berorientasi preventif telah terinternalisasi di seluruh satuan fungsi Polres Kendal, membentuk orientasi kerja yang konsisten. Program sosialisasi, pembinaan karakter, dan kunjungan sekolah yang dilakukan secara berkala mencerminkan bahwa pencegahan dipandang sebagai bagian integral dari tugas kepolisian, bukan sekadar

pelengkap setelah penindakan. Nilai rehabilitatif yang tertanam dalam praktik penanganan sehari-hari merupakan modal sosial yang tidak mudah dibangun dan menjadi pembeda Polres Kendal dari pendekatan yang semata-mata represif.

3. Komitmen kepemimpinan Kapolres yang menjadikan isu tawuran pelajar sebagai agenda strategis berdampak nyata pada koordinasi lintas satuan dan peningkatan intensitas pengamanan. Peningkatan koordinasi yang dirasakan oleh pihak sekolah setelah insiden besar pada 2023–2024, serta intensifikasi patroli yang dicatat oleh warga masyarakat, merupakan cerminan langsung dari prioritas yang ditetapkan pimpinan. Kepemimpinan yang responsif terhadap dinamika lapangan menjadi penggerak perubahan operasional yang sulit digantikan oleh mekanisme prosedural semata.
4. Kolaborasi dengan sekolah melalui jaringan komunikasi antara aparat dan guru Bimbingan Konseling berkontribusi nyata pada perluasan kapasitas deteksi dini. Guru BK yang secara aktif memantau aktivitas media sosial siswa di akhir

pekan dan melaporkan potensi tawuran kepada kepolisian secara langsung berfungsi sebagai sistem peringatan dini berbasis komunitas yang melengkapi kapasitas internal aparat. Kolaborasi ini menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada penurunan intensitas tawuran yang terukur pada 2025.

#### **b. Faktor Penghambat**

1. Keterbatasan personel patroli merupakan hambatan paling mendasar. Jumlah personel yang tersedia untuk kegiatan patroli dan pengamanan lapangan belum sebanding dengan luas wilayah hukum dan intensitas kejadian tawuran. Tim UKL yang bertugas di lapangan pada dini hari kerap hanya beranggotakan sekitar lima orang, sementara kelompok pelajar yang harus diantisipasi bisa berjumlah lebih dari tiga puluh orang. Ketimpangan ini memaksa pengawasan dilakukan secara selektif, sehingga selalu ada titik dan waktu yang tidak terpantau celah yang secara konsisten dieksploitasi pelaku.
2. Komposisi usia personel dan ketahanan operasional dini hari menjadi hambatan yang tidak kalah signifikan. Sebagian besar personel

lapangan Polres Kendal berada pada rentang usia di atas 40 tahun. Patroli yang berlangsung hingga menjelang subuh secara rutin, terutama pada akhir pekan dan hari libur, menimbulkan kelelahan fisik yang berdampak pada kewaspadaan dan daya respons. Pola tawuran yang bergeser ke pukul 05.00–05.30 WIB tepat pada saat jeda antara akhir patroli subuh dan dimulainya aktivitas pagi menunjukkan bahwa celah operasional ini telah menjadi pengetahuan umum di kalangan kelompok gangster pelajar. Di samping faktor fisik, kesenjangan generasi juga menciptakan hambatan kognitif dalam memahami logika eksistensi digital yang menjadi penggerak utama tawuran, sehingga berpengaruh pada ketepatan desain strategi pencegahan.

3. Hambatan geografis dan logistik turut membatasi efektivitas pengamanan. Wilayah hukum Polres Kendal yang mencakup 1.002 km<sup>2</sup> dengan topografi yang beragam dari pesisir Kaliwungu di utara hingga dataran tinggi Patean di selatan menjadikan respons terpusat dari Polres tidak selalu efektif ketika tawuran terjadi di kecamatan yang jauh. Ketika

personel tiba di lokasi, situasi kerap sudah berubah. Alokasi bahan bakar kendaraan dinas yang bersifat tetap pun kerap tidak sebanding dengan pola tawuran yang bergeser-geser lokasi, sehingga dalam beberapa situasi personel terpaksa menutup kekurangan operasional secara mandiri.

4. Lemahnya kontrol sosial keluarga menjadi faktor penghambat eksternal yang berada di luar jangkauan langsung kepolisian. Data laporan Polres Kendal mencatat keterlibatan pelajar SMP berusia 13 tahun dengan senjata tajam, yang menunjukkan bahwa pengawasan pada tingkat paling fundamental yakni keluarga telah melemah secara signifikan. Selama kelemahan ini tidak ditangani melalui kolaborasi lintas institusi yang mengikat secara formal, hasil pembinaan yang dilakukan kepolisian akan terus berhadapan dengan tekanan lingkungan sosial yang jauh lebih lama dan lebih kuat dampaknya.

## **KESIMPULAN**

Kinerja Polres Kendal dalam menangani tawuran pelajar dapat dinilai aktif secara operasional, namun belum optimal secara strategis. Dari kelima

dimensi kinerja menurut Dwiyanto (2006), kualitas layanan dan responsibilitas menunjukkan kondisi yang relatif kuat, didukung oleh pendekatan humanis yang konsisten dan kepatuhan terhadap prosedur perlindungan anak. Sementara itu, produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas horizontal masih menghadapi keterbatasan struktural yang signifikan.

Hambatan kinerja Polres Kendal bersumber dari tiga celah struktural yang saling berkaitan. Pertama, keterbatasan kapasitas personel patroli relatif terhadap luas wilayah dan intensitas kejadian, diperparah oleh fakta bahwa ekosistem digital gangster pelajar bergerak jauh lebih cepat dari kapasitas respons lapangan yang tersedia. Kedua, ketidaksesuaian antara strategi yang masih berorientasi ruang fisik dengan ancaman yang semakin bergerak di ruang siber dalam hitungan jam. Ketiga, absennya protokol lintas institusi yang mengikat secara formal semua pihak kepolisian, sekolah, Bapas, dan Dinas Sosial dalam pemantauan pascapembinaan, sehingga tanggung jawab keberlanjutan jatuh ke dalam kekosongan antara kewenangan masing-masing.

Dari temuan tersebut, tiga rekomendasi paling mendesak dapat dirumuskan. Pertama, pola patroli perlu digeser dari jadwal tetap menuju sistem yang berbasis data intelijen waktu nyata,

agar celah waktu yang secara konsisten dimanfaatkan pelaku dapat diantisipasi lebih awal. Kedua, protokol pemantauan lanjutan pascapembinaan perlu diformalkan dalam komitmen tertulis yang mengikat semua pihak terkait. Ketiga, strategi komunikasi publik yang proaktif perlu dikembangkan untuk menjelaskan kepada masyarakat alasan di balik pembatasan transparansi yang berbasis regulasi, agar akuntabilitas yang sudah dijalankan dengan benar tidak terus-menerus menjadi sumber defisit kepercayaan publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, F., Sari, N., & Mukhlis, R. (2021). Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas pada Dinas Perhubungan Kota Dumai. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2), 89–102.
- Aripin, A. P., Setianingsih, E. L., & Lituhayu, D. (2024). Kualitas Pelayanan Kepolisian Resor Tegal dalam Penanganan Tawuran Pelajar di Kabupaten Tegal. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(4), 508–522.
- Aziz, M., & Rahmawati, T. (2021). Implementasi Penanganan dan Pembinaan SDM Polri yang Terlibat Masalah. *Jurnal Pengembangan SDM Polri*, 5(1), 34–50.
- Cohen, L. E., & Felson, M. (1979). Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach. *American Sociological Review*, 44(4), 588–608.
- Dirgala, R., Handoko, B., & Pratiwi, S. (2023). Predictive Policing: Case Study of Children Brawl in South Jakarta Metro Police. *International Journal of Police Science*, 8(2), 115–130.
- Dwiyanto, A. (2006). *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Fisipol Universitas Gadjah Mada.
- Edco, M., Firmansyah, R., & Wijaya, T. (2025). Optimization of Predictive Policing Technology for Prevention of Brawling Crimes at Bekasi City Metro Police Station. *Journal of Digital Policing*, 3(1), 22–38.
- Erwandi, D., Putra, H., & Sari, M. (2023). Employee Performance Analysis at Regional Secretariat of Lebong District. *Journal of Public Administration*, 9(1), 45–58.
- Grasia, P., Kismartini, & Maesaroh. (2023). Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- (BPBD) Kota Semarang. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), 67–82.
- Hessel, N. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hirschi, T. (1969). *Causes of Delinquency*. Berkeley: University of California Press.
- Ikhsan, M. G., & Danial, E. (2020). Role of Student Brawl and Delinquency Task Force in Managing Juvenile Delinquency in Sukabumi District. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 418, 112–118.
- Karana, A., Santoso, B., & Wibowo, D. (2024). Peran Patroli Perintis Presisi dalam Mencegah Terjadinya Tawuran di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya. *Jurnal Keamanan Nasional*, 10(1), 55–70.
- Keban, Y. T. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Laila, N., & Hidayat, S. (2022). Kinerja Satpol PP dalam Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Semarang. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 6(2), 41–57.
- Maesaroh. (2020). Peran Kinerja Aparatur dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Instansi Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 23–39.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nouvalsukma, F. A., Subowo, A., & Santoso, R. S. (2024). Penanganan Kenakalan Remaja terkait Tawuran oleh Polsek Pasar Minggu. *Journal of Management and Public Policy*, 13(4), 19–34.
- Pandie, H. Y., Fallo, D. F. N., & Kian, D. A. (2023). Implementasi Peranan Kepolisian dalam Mengatasi Kenakalan Remaja serta Hambatan-Hambatan yang Dialami oleh Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(1), 45–60.
- Prihatin, E. (2020). Collaborative Governance dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di Kabupaten Tegal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 78–92.

- Priyono, A. (2023). Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman. *Jurnal Manajemen Publik*, 9(3), 112–128.
- Sugiarti, Y. (2018). Peranan Aparat Penegak Hukum Kabupaten Sumenep dalam Menanggulangi Gepeng di Jalan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(2), 89–104.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Taufik, A., & Sulistyorini, R. (2021). Peran Kepolisian dalam Menyelesaikan Tawuran Antar Warga di Kota Bandung. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 17(1), 33–47.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Wardana, R., Nasution, H., & Pohan, S. (2022). Organizational Commitment, Competence, Motivation, and Work Culture on Job Satisfaction and Performance of Kampar Police Bhabinkamtibmas. *Journal of Police Management*, 4(2), 55–70.
- Yolanda, R., & Suriadi, A. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 10(1), 33–48.